



**IKHTISAR
LAPORAN HASIL PENGAWASAN
ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT**

**M E D A N
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dapat tersusun.

Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Materi Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan ini berdasarkan atas hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2022.

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan disusun dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat, pemerintah yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya.

Medan,

2024

INSPEKTUR,



**LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I INFORMASI UMUM	2
A. Dasar Hukum	2
B. Struktur Organisasi	4
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	6
D. Program Pembinaan dan Pengawasan serta Realisasinya	7
BAB II HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	8
A. Audit Kinerja	8
B. Audit Dengan Tujuan Tertentu	10
C. Reviu	11
D. Evaluasi	14
E. Monitoring	14
F. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lainnya	15
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	19
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu	19
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	20
C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provsu	21
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	27
BAB V PENUTUP	28
A. Simpulan	28
B. Hambatan	28
C. Saran	28
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/336/KPTS/2023 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, sampai dengan Tahun 2023 Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :

1. Audit Kinerja pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemeriksaan Khusus
3. Reviu
4. Evaluasi
5. Pemantauan
6. Kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya

Capaian Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2023 sebagai berikut:

Jumlah Penugasan	Temuan 2023
<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan Rinci = 83• Pemeriksaan Probity = 4• Pemeriksaan Kepatuhan = 4• Pemeriksaan Kinerja = 4• Pemeriksaan Khusus = 57• Pelayanan Dumas = 335• Pemeriksaan Dumas = 269• Pemeriksaan keuangan desa = 15• Pemeriksaan Dana Bos = 14• Pengawasan BUMD = 4• Pemeriksaan Kabupaten/Kota = 33• Reviu = 19• Monitoring = 9• Evaluasi = 65	<ul style="list-style-type: none">• Rekomendasi Administrasi = 1.459• Rekomendasi Kerugian Daerah = 539• Pengembalian Kerugian Daerah = Rp45.697.794.414,47• Sampai ke APH = 6 Kasus

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, Hasil Pengawasan Itjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara kepada Perangkat Daerah dan BUMD kepada Kabupaten/Kota, Pengelolaan Dana BOS serta Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:

Capaian TLHP Tahun 2023

- **TLHP BPK RI = 81,67 %**
- **TLHP Itjen Kemendagri = 100 %**
- **TLHP Itprovsu untuk Kabupaten/Kota = 80,43%**
- **TLHP Itprovsu untuk Perangkat Daerah = 90,13%**
- **TLHP Itprovsu untuk Dana BOS = 87,28%**
- **TLHP Itprovsu untuk Keuangan Desa = 68,75 %**
- **TLHP Itprovsu Dumas = 83,00 %**

BAB I

INFORMASI UMUM

A. DASAR HUKUM

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Korupsi;

14. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
27. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/KPTS/2022 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara didukung Oleh 168 (seratus enam puluh delapan) orang ASN dan 17 (tujuh belas) orang tenaga Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai ASN Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor :	54
1.	Auditor Ahli Madya	8
2.	Auditor Ahli Muda	24
3.	Auditor Ahli Pertama	20
4.	Auditor Penyelia	1
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1
6.	Auditor Pelaksana	-
	Jumlah Pejabat Fungsional P2UPD :	47
7.	Pengawas Pemerintahan Madya	29
8.	Pengawas Pemerintahan Muda	16
9.	Pengawas Pemerintahan Pertama	2
	Jumlah Pejabat Struktural dan Staf :	67
10.	Inspektur	1
11.	Sekretaris	1
12.	Inspektur Pembantu	5
13.	Kasubbag/Subkoordinator	3
14.	Staf (Pelaksana)	40
15.	PNS Titipan	0
15.	Non PNS	17
	TOTAL JUMLAH SDM APIP	185

C. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN

Tujuan penyusunan ikhtisar pelaporan adalah:

1. Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023;
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
4. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat, pemerintah yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya.

D. PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN REALISASINYA

Realisasi Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel terlampir.

BAB II

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. AUDIT KINERJA

Audit kinerja dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta Analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2023 telah melaksanakan audit kinerja terhadap 2 auditi.. Data dan informasi hasil audit kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan

Hasil audit Kinerja pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 9 temuan dan 56% adalah temuan ketidakefektifan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Temuan Hasil Audit Kinerja pada PD/BUMD
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

No.	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan
					(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1.00.00	0	0%	0
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	0	0%	0
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	0	0%	0
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	0	0%	0
4	Administrasi	1.04.00	0	0%	0
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	0	0%	0
	Subtotal Kejadian		0	0%	0
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00	0	0%	0
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	0	0%	0
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	2	22%	0
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	2	22%	0
	Subtotal Kejadian		4	44%	

No.	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Temuan 3 E	3.00.00	0	0%	0
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3.01.00	0	0%	0
2	Ketidakefisienan	3.02.00	1	11%	0
3	Ketidakefektifan	3.03.00	5	56%	0
	Subtotal Kejadian		6	67%	0
	Jumlah		9		

2. Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi

Hasil audit Kinerja pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan 37 rekomendasi temuan dan 46,67 % adalah rekomendasi Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan serta 0% adalah Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rekomendasi Hasil Audit Ketaatan pada PD/BUMD
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

No.	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	4	5	6
01	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	0	0,00%	0
02	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	0,00%	0
03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	0	0,00%	0
04	Penghapusan barang milik negara/daerah	0	0,00%	0
05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	0	0,00%	0
06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	2	10,53%	0
07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	2	10,53%	0
08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	1	5,26%	0
09	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	4	21,05%	0
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	2	10,53%	0

No.	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah	%	Nilai Temuan
		Kejadian		(Rp)
1	2	4	5	6
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	1	5,26%	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	3	15,79%	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	0	0,00%	0
14	Lain-lain	0	0,00%	0
	Jumlah	19	100%	0%

B. AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT)

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Semester I Tahun 2021 telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebanyak 6 audit dengan jenis audit yaitu Audit Investigatif, Audit Ketaatan, *Cut Off*, *Probity* Audit dan Audit Forensik. Data dan informasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.2
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OA	Jumlah Dana OA Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit Investigatif	2	284.738.950.000	2	98.948.950.000	28	1.562.448.300
B	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan	0	-	0	0	0	0
C	Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian	0	-	0	0	0	0
D	Audit Ketaatan	1	73.962.500	1	73.692.500		
D	Cut Off	-	-	0	-	1	1.736.931.878
D	Probity Audit	1	17.398.730.000	1	43.739.852		
D	Audit Forensik	1	50.000.000	1	48.000.000		
	Jumlah	5	302.261.642.500	5	99.114.382.352	29	3.299.380.178

Audit Investigatif sampai dengan Tahun 2023 dilakukan sebanyak 4 kali, dengan 96,43 % diantaranya berindikasi tindak pidana korupsi. Data dan informasi lebih lanjut mengenai Audit Investigatif dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Objek Audit Investigatif
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek audit investigatif	28
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	27
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	96,43%

Audit Investigatif yang dilimpahkan ke instansi penyidik disebabkan berindikasi tindak pidana korupsi adalah sebanyak 2 kasus ke kejaksaan. Data dan informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara	
			Rupiah	Valas
1	2	3	4	5
Kepolisian	—	—	—	
Kejaksaan	2		Rp 496.260.800,00	
			Rp 1.166.187.500,00	
KPK	—	—	—	
Jumlah			Rp 1.662.448.300,00	

C. REVIU

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan reviu dengan objek yang telah direviu sebanyak 20 objek. Data dan informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.4
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek yang seharusnya direviu	24
Jumlah objek yang direviu	20
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	16
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	5

Kegiatan-kegiatan reviu yaitu antara lain :

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
2. Reviu Standar Satuan Harga (SSH) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu TA 2022-2023;
3. Reviu terhadap Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provsu TA 2022;
4. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provsu Tahun 2021;
5. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Provsu TA 2023;
6. Reviu Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah Provsu TA 2023;
7. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikura, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Balitbang, Bakesbangpol, Satpol PP dan Inspektorat Provsu TA 2023 & Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikura, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Balitbang, Bangkesbangpol, Satpol PP dan Inspektorat Provsu TA 2023;
8. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Bapeda, Dinas Kelautan dan Peikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Badan Penghubung daerah, Biro organisasi dan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu TA 2023 & melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Bapeda, Dinas Kelautan dan Peikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan, Dinas Kehutanan, Badan Penghubung daerah, Biro organisasi dan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu TA 2023;

9. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Perekonomian dan Biro Umum Setdaprovsu TA 2023 & melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Perekonomian dan Biro Umum Setdaprovsu TA 2023;
10. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Pendidikan, Dinas ESDM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi, dan Informatika, BPKAD, dan BPRD Provsu TA 2023 & melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas Pendidikan, Dinas ESDM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi, dan Informatika, BPKAD, dan BPRD Provsu TA 2023;
11. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas SDA CK & TR, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Hukum Setdaprovsu TA 2023 & melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada SDA CK & TR, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Hukum Setdaprovsu TA. 2022;
12. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UKM, BPBD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA, BPSDM dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provsu TA 2023 & melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UKM, BPBD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA, BPSDM dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provsu TA 2023;
13. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu, Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu dan RSUD Haji Medan Provsu TA 2023 & melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu, Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu dan RSUD Haji Medan Provsu TA 2023;

14. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas PMPPTSP, Sekertariat DPRD, RSJ. Prof. Dr. M. Ildrem, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan Dinas Kesehatan Provsu TA 2023 & Pelaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas PMPPTSP, Sekertariat DPRD, RSJ. Prof. Dr. M. Ildrem, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan Dinas Kesehatan Provsu TA 2023;

D. EVALUASI

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan evaluasi sebanyak 82 objek. Data hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.5.

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	82
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	1
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	81

D. MONITORING

Kegiatan monitoring yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2023 yaitu antara lain :

1. Monitoring Pengelolaan Keuangan Inspektorat Kab/ Kota berbasis Fungsional pada Kab Asahan
2. Monitoring Pengelolaan Keuangan Inspektorat Kab/ Kota berbasis Fungsional pada Kab Asahan
3. Monitoring dan Evaluasi atas penyelesaian Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan cabang Dinas Pendidikan Provsu
4. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu TA 2023
5. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Provsu TA 2023
6. Monitoring atas Bezetting Data Jabatan Fungsional PPUPD serta Koordinasi penilaian angka kredit PPUPD sesuai Permenpan No 36 Tahun 2020 pada Inspektorat Kabupaten Simalungun

7. Monitoring atas Bezetting Data Jabatan Fungsional PPUPD serta Koordinasi penilaian angka kredit PPUPD sesuai Permenpan No 36 Tahun 2020 pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi
8. Monitoring atas Bezetting Data Jabatan Fungsional PPUPD serta Koordinasi penilaian angka kredit PPUPD sesuai Permenpan No 36 Tahun 2020 pada Inspektorat Kab Deli Serdang
9. Monitoring atas Bezetting Data Jabatan Fungsional PPUPD serta Koordinasi penilaian angka kredit PPUPD sesuai Permenpan No 36 Tahun 2020 pada Inspektorat Kota Pematang Siantar
10. Monitoring atas Bezetting Data Jabatan Fungsional PPUPD serta Koordinasi penilaian angka kredit PPUPD sesuai Permenpan No 36 Tahun 2020 pada Inspektorat Kab Serdang Bedagai
11. Monitoring atas Buzzetting Data Jabatan serta Koordinasi Penilaian Angka Kredit PPUPD di Kab Tapanuli Utara
12. Monitoring pengadaan barang/jasa pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provsu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu dan Dinas Tenaga Kerja Provsu TA 2023
13. Monitoring Pengelolaan Keuangan Inspektorat Kab/Kota berbasis fungsional pada Kota Tebing Tinggi
14. Monitoring Pengelolaan keuangan Inspektorat Kab/Kota berbasis fungsional pada Kota Binjai
15. Monitoring Pengelolaan keuangan Inspektorat Kab/Kota berbasis fungsional pada Kab Langkat
16. Monitoring Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Kota Padangsidempuan Tahun 2021-2022
17. Monitoring Perencanaan dan Penganggaran Responsif pada Kab Tapanuli Selatan Tahun 2021-2022
18. Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Provsu TA 2023;

E. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2023 yaitu antara lain:

1. Pendampingan dan Asistensi

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan Pendampingan dan Asistensi, yaitu antara lain:

- Pendampingan terhadap tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Pendampingan BPK RI perwakilan Provsu terhadap pemeriksaan kinerja pendahuluan atas upaya penanggulangan kemiskinan TA 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi yang Terkait di Medan;
- Pendampingan/Reviu DAK-TA. 2021 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

2. Verifikasi

- Melakukan verifikasi akhiraset Kabupaten Nias dengan Kota Gunungsitoli atas tundak lanjut kesepakatan dengan KPK RI terkait pemekaran Kota Gunungsitoli;
- Melaksanakan verifikasi data daftar tunggu pelanggan dalam rangka Program Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan pada Provsu TA 2023;
- Pengujian atas pembelian Sarana Produksi Budi Daya benih Cabai Dan Jagung oleh CV PGE pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- Evaluasi Hibah pada UPT RS Indrapura;

3. Kegiatan Pengawasan lainnya

a. Penutupan Buku Kas Umum Daerah Tahun 2022.

Dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penutupan Buku Kas Umum Daerah Tahun 2022 dengan tujuan menentukan pisah batas TA.2021, meneliti kebenaran perhitungan saldo kas daerah pada penutupan buku TA.2022 serta menilai ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Hasil penutupan Buku Kas Umum Daerah mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan penutupan Buku Kas Umum Daerah Tahun 2019. Atas hal-hal tersebut telah ditindaklanjuti secara keseluruhan dengan melakukan koreksi atas Buku Kas Umum Daerah TA.2022.

b. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang diadakan sampai dengan Tahun 2023 adalah ;

- Pelatihan Evaluasi SAKIP;

- Self Assesment Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- c. Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI);

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2023 telah kegiatan, yakni sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas penyelidikan dan deteksi aksi dugaan terjadinya pungli pada saat berlangsungnya pengujian kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Dinas Perhubungan di Kota Sipirok Kab.Tapsel, Kota Penyabungan Kab. Madina, Kota Padangsidimpuan Kotamadya Padangsidimpuan dan Kota Sibuhuan Kab.Palas.;
- Melaksanakan tugas penyelidikan dan deteksi aksi dugaan terjadinya pungli dalam pengurusan sertifikat Program Nasional di Desa Tigaras oleh Pejabat BPN dan perangkat Desa Tigaras Kab. Simalungun;
- Melakukan Sosialisasi pencegahan pungutan liar pada Kabupaten Langkat dan Kota Binjai;
- Melakukan supervisi yustisi pada Kota Medan, Kota Binjai dan kabupaten Langkat;
- Melakukan kegiatan Saber Pungli Go to Campuss pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- Melakukan Penyelidikan dugaan kecurangan Pokja dalam Proses pelelangan umum pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Kalianget (Sumenep) Sebagaimana pengaduan dari PT. Multi Karya Pratama (MKP) yang beralamat Jalan Sendok No. 52 D Medan
- Melakukan Penyelidikan dugaan kecurangan Pokja dalam proses pelelangan Umum pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Kalianget (Sumenep) sebagaimana pengaduan dari PT. Multi Karya Pratama (MKP) yang beralamat di Jalan Sendok No. 52 D Medan.
- Melaksanakan tugas peninjauan dan koordinasi UPP Kab. Asahan dan instansi terkait dalam rangka kegiatan pencangan kota asahan sebagai kota bebas pungli

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 75,67 %, dimana Pemprovsu dapat menyelesaikan sebanyak 1.424 rekomendasi dari 1.907 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai 2021. Progres persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dari Tahun 2016 s.d Tahun 2023 dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1
Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI
s.d Sem II Tahun 2023

No	Uraian	2023
1	Jumlah Temuan	711
2	Jumlah Rekomendasi	2.062
3	Jumlah Rekomendasi Selesai	1.623
4	% Rekomendasi Selesai	81,67 %

B. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Untuk pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan 100% rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

No	Uraian	2023
1	Jumlah Temuan	21
2	Jumlah Rekomendasi	29

3	Jumlah Rekomendasi Selesai	29
4	% Rekomendasi Selesai	100 %

C. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2023. Rekapitulasinya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada Perangkat Daerah dan BUMD

No	Uraian	2023
1	Jumlah Temuan	4.857
2	Jumlah Rekomendasi	5.928
3	Jumlah Rekomendasi Selesai	5.342
4	% Rekomendasi Selesai	90,13%

2. Pada Pemerintah Kabupaten Kota

No	Uraian	2023
1	Jumlah Temuan	6.069
2	Jumlah Rekomendasi	7.768
3	Jumlah Rekomendasi Selesai	6.247
4	% Rekomendasi Selesai	80,43%

3. Pada Keuangan Desa

No	Uraian	2023
1	Jumlah Temuan	432
2	Jumlah Rekomendasi	629

3	Jumlah Rekomendasi Selesai	432
4	% Rekomendasi Selesai	68,75%

4. Pada Pengelaan Dana Bos

No	Uraian	2023
1	Jumlah Temuan	1.621
2	Jumlah Rekomendasi	1.996
3	Jumlah Rekomendasi Selesai	1.742
4	% Rekomendasi Selesai	87,28%

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Sampai dengan Tahun 2023 Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/346/KPTS/2022 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan beberapa kegiatan di luar Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2023 yaitu monitoring capaian PKPT pada 18 Kabupaten/Kota;

3. Capaian TLHP BPK-R1 sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar 81,67%. Jumlah temuan 711 dengan jumlah rekomendasi 2.062 dan telah selesai 1.623. Nilai kerugian daerah sebesar Rp430.009.781.441,35 dan telah dipulihkan sebesar Rp282.397.660.198,37
4. Capaian TLHP Itjen Kemendagri sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar 100%. Jumlah temuan 21 dengan jumlah rekomendasi 20 dan telah selesai 29. Nilai kerugian daerah sebesar Rp54.434.080 dan telah dipulihkan seluruhnya.
5. Capaian TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Perangkat Daerah sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar 90,13%. Jumlah temuan 4.857 dengan jumlah rekomendasi 5.928 dan yang telah diselesaikan 5.342. Jumlah kerugian daerah sebesar Rp148.836.210.081,54 dan telah dipulihkan sebesar Rp80.881.620.542,98.
6. Capaian TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar 80,43%. Jumlah temuan 6.069 dengan jumlah rekomendasi 7.768 dan yang telah diselesaikan 6.247. Jumlah kerugian daerah sebesar Rp410.464.098.210,35 dan telah dipulihkan sebesar Rp299.742.123.804,24.
7. Capaian TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pengelolaan Keuangan Desa sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar 68,75%. Jumlah temuan 432 dengan jumlah rekomendasi 629 dan yang telah diselesaikan 432. Jumlah kerugian daerah sebesar Rp18.268.201.539,19 dan telah dipulihkan sebesar Rp8.066.655.767,04.
8. Capaian TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pengelolaan Dana BOS sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar 87,28%. Jumlah temuan 1.621 dengan jumlah rekomendasi 1.996 dan yang telah diselesaikan 1.742. Jumlah kerugian daerah sebesar Rp69.756.984.657,22 dan telah dipulihkan sebesar Rp62.809.263.314,73
9. Pengaduan masyarakat Tahun 2023 sebanyak 380 Pengaduan dan yang telah selesai ditindaklanjuti 314 dengan persentase sebesar 83%.

B. HAMBATAN

1. Keterbatasan SDM di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Keterbatasan prasarana dan sarana;
3. Perubahan nomenklatur perangkat daerah yang menyebabkan temuan sulit ditindaklanjuti.

C. SARAN

Sehubungan dengan simpulan dan hambatan tersebut di atas perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah pegawai serta mengikutsertakan pegawai dalam Diklat, Pelatihan Kantor Sendiri, FGD, workshop, dan bimbingan teknis;
2. Menambah peralatan kerja teknis serta membuat ruang pemeriksaan investigasi yang berstandar;
3. Menambah anggaran untuk pengaduan masyarakat.

LAMPIRAN I. REALISASI PKP2T TAHUN 2023

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
JANUARI 2023				
1.	Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Kabupaten/Kota	Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota (33 Daerah) 16 Tim x 7 Hari x 7 Orang 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 3. Pelayanan Publik 4. Pengarusutamaan Gender (PUG) 5. Reformasi Birokrasi (RB) 6. Zona Integritas (ZI) 7. Maturitas SPIP 8. Kapabilitas APIP 9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 10. Merit Sistem 11. Pengembangan E-katalog Lokal	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	
2.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	1. Kabupaten Batubara 2. Kabupaten Serdang Bedagai	√ √	
3.	Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	√	
4.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	√ √ √ √	
5.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	√	
FEBRUARI 2023				
1.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	√	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
2.	Reviu Dana Alokasi Khusus	1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Dinas Pendidikan	√	
3.	Reviu RENSTRA	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	√	
4.	Reviu LAKIP	Biro Organisasi	√	
5.	Reviu LPPD	Seluruh OPD Pemprovsu (49 OPD)	√	
6.	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Serdang Bedagai	√	
7.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	1. Kabupaten Langkat 2. Kabupaten Labuhan Batu	√ √	
8.	Audit Penggunaan Dana BOS SMA/SMK	Cabang Dinas Teluk Dalam	√	
9.	Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Perangkat Daerah Provinsi	Seluruh Perangkat Daerah Provsu (41 PD) 21 Tim x 5 Hari x 5 Orang 1. Pelayanan Publik 2. Pengarusutamaan Gender (PUG) 3. Reformasi Birokrasi (RB) 4. Zona Integritas (ZI) 5. Maturitas SPIP 6. Kapabilitas APIP 7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 8. Merit Sistem 9. Pengembangan E-katalog Lokal	√ √ √ √ √ √ √ √ √	

MARET 2023

1.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	√ √ √ √	
2.	Reviu Dana Alokasi Khusus	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Kesehatan	√ √	
3.	Reviu Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa	BKAD dan Biro PBJ (2T)	√	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
4.	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kabupaten Pakpak Bharat 2. Kabupaten Padang Lawas 3. Kabupaten Karo 4. Kabupaten Langkat 5. Kabupaten Nias Barat	'√' '√' '√' '√' '√'	
5.	Audit Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum	'√'	
6.	Audit Kepatuhan/Ketaatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	'√'	
7.	Pengawasan Keuangan (Rinci) PD Pemprovsu	Badan Pendapatan Daerah	'√'	
8.	Audit Penggunaan Dana BOS SMA/SMK	1. Cabang Dinas Balige 2. Cabang Dinas Sidempuan 3. Cabang Dinas Sunggal	'√' '√' '√'	
9.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	1. Kabupaten Padang Lawas Utara 2. Kota Padang Sidempuan	'√' '√'	
10.	Cut Off	9 (sembilan) Perangkat Daerah Pemprovsu (9 Tim)	'√'	
APRIL 2023				
1.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	'√' '√' '√' '√'	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
2.	Monitoring Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance) pada Perangkat Daerah Provinsi	1. Perangkat Daerah pada Irban I (2 Tim) 2. Perangkat Daerah pada Irban II (3 Tim) 3. Perangkat Daerah pada Irban III (2 Tim) 4. Perangkat Daerah pada Irban IV (3 Tim)	'√ '√ '√ '√	
3.	Evaluasi : Laporan Kinerja PD Pemprowsu (Lakip OPD)	Seluruh Perangkat Daerah Pemprowsu (41 OPD/16 Tim)	'√	
4.	Evaluasi PID		'√	
5.	Probit Audit	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman & Tata Ruang	'√ '√	
6.	Audit Kinerja	Dinas Pendidikan	'√	
7.	Audit Penggunaan Dana BOS SMA/SMK	1. Cabang Dinas Sei Rampah 2. Cabang Dinas Stabat	'√ '√	
8.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	1. Kota Binjai 2. Kabupaten Deli Serdang	'√ '√	
9.	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kabupaten Pakpak Bharat 2. Kabupaten Padang Lawas	'√ '√	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
MEI 2023				
1.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	'√' '√' '√' '√'	
2.	Reviu Dana Alokasi Khusus	Dinas Pekerjaan Umum	'√'	
3.	Reviu RKPD	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	'√'	
4.	Reviu Standard Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisa Standar Biaya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	'√'	
5.	Reviu Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	'√'	
6.	Reviu KUA-PPAS	Badan Keuangan dan Aset Daerah	'√'	
7.	Pengawasan Keuangan (Rinci) PD Pemprovsu	1. Rumah Sakit Umum Haji 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa	'√' '√'	
8.	Audit Penggunaan Dana BOS SMA/SMK	1. Cabang Dinas Pematang Siantar 2. Cabang Dinas Humbang Hasundutan 3. Cabang Dinas Medan Utara 4. Cabang Dinas Tanjung Balai 5. Cabang Dinas Kisaran 6. Cabang Dinas Lubuk Pakam 7. Cabang Dinas Rantauprapat	'√' '√' '√' '√' '√' '√' '√'	
9.	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kabupaten Nias Barat 2. Kota Gunung Sitoli 3. Kabupaten Toba 5. Kabupaten Simalungun	'√' '√' '√' '√'	
10.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	Kabupaten Nias Utara	'√'	
JUNI 2023				
1.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota (33 Daerah) 33 Tim x 7 Hari x 7 Orang	'√'	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
2.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	'√ '√ '√ '√	
3.	Reviu Dana Alokasi Khusus	1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Kesehatan	'√ '√ '√	
4.	Reviu P-RKPD	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	'√	
5.	Reviu RENJA	Badan Keuangan dan Aset Daerah	'√	
6.	Reviu Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa	BKAD dan Biro PBJ (2T)	'√	
7.	Audit Kepatuhan/Ketaatan	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	'√ '√	
8.	Probit Audit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	'√	
9.	Pengawasan Keuangan (Rinci) PD Pemprovsu	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Sosial	'√ '√ '√	
10.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	1. Kabupaten Humbang Hasundutan 2. Kabupaten Karo	'√ '√	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
JULI 2023				
1.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	'√' '√' '√' '√'	
2.	Reviu P-KUA-PPAS	Badan Keuangan dan Aset Daerah	'√'	
3.	Reviu Dana Alokasi Khusus	Dinas Pekerjaan Umum	'√'	
4.	Audit Kepatuhan/Ketaatan	Dinas Ketenagakerjaan	'√'	
5.	Pengawasan Keuangan (Rinci) PD Pemprov	1. Biro Organisasi 2. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. D. Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 6. Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 7. RSJ. Prof. Dr. M. Ildrem	'√' '√' '√' '√' '√' '√' '√'	
6.	Audit Penggunaan Dana BOS SMA/SMK	1. Cabang Dinas Medan Selatan 2. Cabang Dinas Kabanjahe 3. Cabang Dinas Gunung Tua	'√' '√' '√'	
7.	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kabupaten Padang Lawas Utara 2. Kabupaten Nias Utara 3. Kabupaten Labuhan Batu	'√' '√' '√'	
8.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	1. Kota Pematang Siantar 2. Kabupaten Simalungun 3. Kota Tebing Tinggi	'√' '√' '√'	
AGUSTUS 2023				
1.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	'√' '√' '√' '√'	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
2.	Reviu Dana Alokasi Khusus	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	√	
3.	Reviu Rancangan RKA-P	Seluruh OPD Pemprovsu (41 OPD)	√	
4.	Reviu Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	√	
5.	Reviu SDM	Badan Kepegawaian	√	
6.	Audit Kinerja	Dinas Kelautan dan Perikanan	√	
7.	Pengawasan Keuangan (Rinci) PD Pemprovsu	1. Biro Umum 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Kepegawaian 4. Badang Penghubung	√ √ √ √	
8.	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kabupaten Tapanuli Tengah 2. Kabupaten Mandailing Natal 3. Kabupaten Deli Serdang	√ √ √	
9.	Audit Penggunaan Dana BOS SMA/SMK	1. Cabang Dinas Gunung Sitoli 2. Cabang Dinas Sibolga	√ √	
10.	Pengawasan Umum & Teknis (Reguler)	1. Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2. Kota Pematang Siantar 3. Kabupaten Asahan 4. Kabupaten Toba	√ √ √ √	
10.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	1. Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2. Kabupaten Padang Lawas	√ √	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
SEPTEMBER 2023				
1.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	'√ '√ '√ '√	
2.	Reviu Dana Alokasi Khusus	Dinas Kesehatan	'√	
3.	Reviu RKA	Seluruh OPD Pemprovsu (41 OPD)	'√	
4.	Reviu Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa	BKAD dan Biro PBJ (2T)	'√	
5.	Probit Audit	Dinas Komunikasi dan Informatika	'√	
6.	Pengawasan Keuangan (Rinci) PD Pemprovsu	1. Sekretariat DPRD 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sum Daya Mineral 3. Biro Hukum 4. Biro Administrasi Pembangunan 5. Biro Kesejahteraan Rakyat 6. PT. Pembangunan Prasarana Sumut	'√ '√ '√ '√ '√ '√	
7.	Pengawasan Umum & Teknis (Reguler)	1. Kabupaten Nias 2. Kabupaten Padang Lawas 3. Kabupaten Karo 4. Kota Tanjung Balai 5. Kota Padang Sidempuan	'√ '√ '√ '√ '√	
8.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	1. Kabupaten Tapanuli Tengah 2. Kota Sibolga	'√ '√	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
OKTOBER 2023				
1.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	✓ ✓ ✓ ✓	
2.	Reviu Dana Alokasi Khusus	Dinas Pendidikan	✓	
3.	Pengawasan Keuangan (Rinci) PD Pemprov	1. Biro Administrasi Pimpinan 2. PDAM Tirtanadi	✓ ✓	
4.	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kabupaten Samosir 2. Kabupaten Tapanuli Utara	✓ ✓	
5.	Pengawasan Umum & Teknis (Reguler)	1. Kabupaten Pakpak Bharat 2. Kabupaten Serdang Bedagai 3. Kabupaten Nias Utara 4. Kabupaten Padang Lawas Utara 5. Kabupaten Nias Selatan 6. Kabupaten Mandailing Natal 7. Kabupaten Tapanuli Tengah 8. Kabupaten Simalungun 9. Kabupaten Tapanuli Utara 10. Kabupaten Nias Barat	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
6.	Pemeriksaan Tertentu : Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	Kabupaten Batubara	✓	
7.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	1. Kota Tanjung Balai 2. Kabupaten Asahan	✓ ✓	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
NOPEMBER 2023				
1.	Reviu Serapan Anggaran	1. Perangkat Daerah pada Irban I 2. Perangkat Daerah pada Irban II 3. Perangkat Daerah pada Irban III 4. Perangkat Daerah pada Irban IV	'√' '√' '√' '√'	
2.	Reviu Dana Alokasi Khusus	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Dinas Kesehatan	'√' '√' '√' '√'	
3.	Reviu SDM	Badan Kepegawaian	'√'	
4.	Pengawasan Keuangan (Rinci) PD Pemprov	1. PT. Perkebunan 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Dinas Perpustakaan dan Arsip 4. Dinas Kesehatan	'√' '√' '√' '√'	
5.	Audit Kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
6.	Pemeriksaan Tertentu : Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	1. Kabupaten Padang Lawas Utara 2. Kota Padang Sidempuan	'√' '√'	
7.	Pengawasan Umum & Teknis (Reguler)	1. Kabupaten Batubara 2. Kota Gunung Sitoli 3. Kabupaten Labuhan Batu Utara 4. Kabupaten Langkat 5. Kabupaten Labuhan Batu	'√' '√' '√' '√' '√'	
8.	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Nias Selatan	'√'	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
9.	Sosialisasi WTP dan Pembinaan Umum	1. Kabupaten Mandailing Natal 2. Kabupaten Nias Selatan	√ √	

DESEMBER 2023

1.	Reviu Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa	BKAD dan Biro PBJ (2T)	√	
2.	Penutupan Buku Kas Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	√	

LAINNYA

1.	Pemeriksaan Khusus	Perangkat Daerah Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara pada Bulan Januari - Desember (7 Org x 10 hari x 3 Tim x 9 bulan)	√	
2.	Audit Investigasi	Perangkat Daerah (PM) 7 Org x 14 hari x 12 bln	√	
3.	Audit Forensik	Perangkat Daerah (PM): 8 Org x 14 hari x 6	√	
4.	Monitoring Center of Prevention (MCP)	Perangkat Daerah (PM) 6 Org x 6 hari x 4	√	
5.	Monitoring Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Perangkat Daerah (PM) 6 Org x 6 hari x 4	√	
6.	Monev. UPG	Perangkat Daerah (PM) 6 Org x 6 hari x 2	√	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	AREA PENGAWASAN	KETERANGAN	
			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
1	2		5	6
1.	Monitoring TLHP pada Perangkat Daerah Pemprov	Perangkat Daerah Pemprov Bulan Februari - Nopember (7 Org x 5 hari x 6 Tim x 10 bulan)	√	
2.	Monitoring TLHP pada Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Bulan Februari - Nopember : (7 Org x 6 hari x 6 Tim x 10 bulan)	√	
	Monitoring dan Evaluasi PKP2T	Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Bulan Februari - Maret : (7 Org x 6 hari x 6 Tim x 3bulan)	√	
3.	Pendampingan terhadap pemeriksaan BPK-RI	Perangkat Daerah (PM)	√	
4.	Pendampingan terhadap pemeriksaan Itjen Kemendagri	Perangkat Daerah (PM)	√	
5.	Saber Pungli			
6.	Pendidikan dan Pelatihan	Auditor dan PPUPD pada bulan Januari - Desember 2023	√	
7.	Pembinaan Pengelolaan Inspektora Kabupaten/Kota berbasis fungsional	Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara 36 Orang x 5 hari bulan Januari - Desember 2023	√	